

MODEL PEMBINAAN PKL DI KOTA SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN EDUKASI LEWAT BIMBINGAN DAN PENYULUHAN (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif)

Joko Suwandi, Budi Sutrisno

Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: js171@ums.ac.id

ABSTRACT

The sustainable issue of street vendor (PKL) management in Surakarta needs a programmed supervision model in order to make PKL growing and having greater impact. The research aimed to arrange a PKL coaching model which is well programmed and sustainable to make PKL become a power of stable economic people and capable to support many city development programs including The City Creatif Action Program year 2017-2021. This improvisation research studied the first year research findings with the colleagues who have responsibility in PKL supervision, observer and practitioner, in turn developing a programmed and sustainable model. The critical analysis was used to analyze the data which is analyze the weaknesses and strength a model so that it become the most suitable model. The coaching is arranged as follows: (1) The implementation syntax consists of: bring around and forming attitude leads up to care and aware attitude, expand knowledge transformation, capability, basic skills, and intellectual skill improvement in order to develop initiative and innovation skill to reach an autonomy. (2) The coaching scope consists of: a) arrange a stable business environment, b) capital assistance, c) business protection, d) partnership development, e) training, f) establish special institution, g) promotion development, h) develop facilities and infrastructure. (3) Coaching PKL based on counseling and guidance. (4) Implementation of counseling and developing PKL consists of: a. Counseling and developing in production and processing, b. Marketing, c. Human resources, d. technology.

Keywords: *model development, PKL, creative city action program*

PENDAHULUAN

Kota Surakarta atau sering disebut sebagai Kota Solo, saat ini sedang mengembangkan program ekonomi kreatif, dengan diberi sebutan 'Program Aksi Kota Kreatif'. Program dimulai dari tahun 2015, dengan tujuan utama adalah mendorong peningkatan kehidupan sosial masyarakat kota, peningkatan ekonomi kota, mengembangkan iklim bisnis, dan pembangunan citra kawasan. Modal dasarnya adalah tersedianya sumber daya insani yang mumpuni, daya kreasi yang

unggul, posisi geografi yang strategi sebagai daerah transit, *landmark* kota yang terkenal, pemerintah kota yang peduli dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan tersedianya jaringan pemasaran yang memadai, menjadi modal dasar bagi pengembangan ekonomi kreatif itu.

Hal ini selaras dengan kriteria konsep pengembangan ekonomi kreatif menurut *The United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD* (2010), yaitu; 1) sebagai sumber penghasilan, sebagai pembuka lapangan kerja, serta mempromosikan keterbukaan sosial dan pembangunan kebudayaan dan manusia di suatu kota; 2) sebagai penumbuh jalinan interaksi antara aspek ekonomi-sosial-budaya dengan teknologi dan kekayaan intelektual; 3) sebagai lahan penerapan aktivitas ekonomi yang didasari oleh ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*); 4) menjadi tempat berkembangnya inovasi dan aktivitas pengambilan keputusan yang bersifat multidimensional; dan 5) industri kreatif (*creative industries*).

Berkait dengan penelitian ini, pertanyaan besar pertama yang perlu jawaban adalah; Apakah usaha PKL dapat dikembangkan sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan perkotaan? Jawabannya 'bisa'. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa usaha PKL telah mampu mengangkat nama Kota Surakarta sebagai kota kuliner, kota pasar barang antik, kota pasar barang klithikan dan sebagainya, sebagai pembuka lapangan kerja, sumber penghasilan masyarakat kota. Di mata para penggemar kuliner, Kota Surakarta yang sangat terkenal dengan berbagai jenis kuliner yang melegenda. Beberapa warung kuliner yang sangat terkenal antara lain; Tengkleng Bu Edy di Pasar Klewer, Gudeg Ceker Bu Kasno di Margoyudan, Mie Toprak Yu Nani di Kartopuran, Sate Kere Yu Rebi di Sriwedari, Susu Segar si Jack, Gempol Pleret yu Yami, Markobar di Kota Barat, Bestik Harjo, Wedangan Mbah Wir, Wedangan Basuki, Wedangan Pak Kumis, Es Kobar, Bakso Pawirorejo, dan sebagainya. Semua yang disebut itu mengawali rintisan usahanya melalui usaha perdagangan kakilima. Semua pernah merasakan bagaimana pahit getirnya berdagang bertahun-tahun di pinggir jalan yang bukan tempat peruntukkan serta menghadapi berbagai kemungkinan penggusuran oleh Pemkot. Termasuk juga PKL Klithikan dan PKL barang antik.

Seiring berjalannya waktu, Pemkot mengadakan penataan kota dengan menghimbau para pedagang untuk tidak menggunakan area larangan bagi usaha PKL. Beberapa PKL telah memindahkan usahanya ke tempat usaha permanen dengan menyewa lahan milik perorangan atau membeli lahan, tetapi sebagian masih tetap bertahan sebagai PKL pinggir jalan. Penataan tidak hanya bagi usaha kuliner tetapi juga kepada pedagang barang-barang antik dan klithikan yang sebagian telah di relokasi ketempat-tempat tertentu, seperti Pasar barang antik Triwindu atau Ngarsopuro, Pasar Batu Mulia dan Gamelan Keraton Surakarta (Gladag), Pasar Wesi Aji di Timur Alun-alun Utara Keraton Surakarta, Pasar Klithikan Notoharjo dan Pasar Elpabes (pasar elektronik, pakaian dan besi) di Banjarsari.

Pertanyaan kedua 'Bagaimana mengembangkan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kreatif? Dari fakta sejarah yang didukung hasil penelitian Pramono, dkk (2013) dan penelitian Suwandi (2006) menunjukkan bahwa usaha PKL di Kota Surakarta yang pada awalnya masih bersifat tradisional dalam pengelolaan dan

orientasinya, kini berkembang menjadi usaha yang sangat dinamis, penuh kreasi dan inovasi dalam mendukung program aksi kota kreatif. Usaha PKL tidak lagi menjadi usaha rakyat kecil untuk bertahan hidup saja (*subsisten*) tetapi telah menjadi usaha 'orang bermodal' untuk meningkatkan kesejahteraan/*welfare* (Suwandi dan Muhibbin, 2012). Sebagai contoh paling nyata adalah usaha 'Hik', yang identik dengan kuliner makanan dan minuman malam untuk masyarakat kalangan bawah, yang dijajakan berkeliling kampung dengan dipikul. Sekarang beberapa 'Hik' telah ber-metamorfose menjadi 'Hik (wedangan) Modern'. Tampilan berubah menjadi lebih 'wah' dengan tambahan jenis makanan dan minuman yang lebih kekinian, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti; koneksi wifi, *life music*, tempat duduk yang representatif untuk bersantai dan nongkrong bagi kawula muda milenial. Perubahan ini menjadi bukti bahwa para PKL memiliki daya kreatifitas untuk merespon perkembangan dan perubahan perilaku masyarakat konsumtif milenial. Perubahan ini terjadi tidak hanya pada PKL kuliner, tetapi PKL barang antik dan klithikan juga terbukti dapat mengangkat Kota Surakarta menjadi destinasi wisata bagi penggemar kuliner, penggemar barang antik, dan barang klithikan.

Pengembangan usaha PKL diarahkan kepada pemberdayaan potensi yang dimilikinya melalui program pembinaan, agar pedagang memiliki kemampuan untuk menjadikan usahanya sebagai; sumber penghidupan, sebagai katup pengaman sosial dan sekaligus sebagai penyumbang PAD kota (Sutrisno dan Suwandi, 2014). Untuk itu pengembangan yang bersifat kreatif akan diarahkan pada; pemberdayaan jiwa kewirausahaan, kemampuan untuk mengubah manajemen pengolahan, penyajian dan promosinya, manajemen tempat usaha dan manajemen keuangannya dengan berorientasi pada pendekatan sosial budaya, ekonomi dan Normatif (yustisi dan non yustisi).

Secara normatif, keberhasilan pengelolaan PKL tidak hanya akan berhenti pada keberhasilan menata atau merelokasi PKL ke tempat-tempat yang ditentukan Pemkot, tetapi harus dilanjutkan sampai pada tingkat pemberdayaan melalui pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan, sehingga kejadian usaha PKL 'mati' setelah direlokasi bisa diminimalkan. Dapat dianalogkan seperti seseorang memindah tanaman dari satu tempat ketempat lain. Apabila dipindah dan tidak dibantu merawat niscaya kemungkinan bisa mati atau tidak tumbuh dengan baik, tetapi berbeda kalau setelah dipindah dilakukan perawatan secara seksama, seperti; dibantu penyiraman, dipupuk, dijaga dari hama dan sebagainya, niscaya tanaman itu akan tumbuh subur dan menghasilkan.

Pembinaan dan pemberdayaan menjadi kata kunci bagi pengembangan PKL agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat kecil. Ramadhan (2015) menyatakan bahwa pembinaan yang diberikan oleh penguasa daerah terbukti sangat membantu dalam cara atau langkah dalam pengembangan usaha PKL. Hal ini diperkuat oleh Indriyanti (2014), yang mengatakan bahwa pembinaan yang tepat akan mampu memandirikan PKL dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat menciptakan ketertiban umum.

Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik (Badudu, 2008:316). Secara konseptual, pembinaan sering juga disebut dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*), yang secara harfiah mengandung arti memberikan

atau mendapatkan kekuatan (*power*). Hal ini sesuai dengan pendapat Friedmann (1992), bahwa pembinaan kepada kelompok atau secara kolektif (seperti PKL), selalu terkait dengan memberikan kemampuan kepada mereka yang biasanya tidak berdaya, untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu usahanya.

Bentuk pembinaan mencakup kegiatan pemberian pengarah dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang usaha, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Hasil penelitian Qasanova dan Khairani (2013) menunjukkan bahwa pembinaan PKL harus menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan dilakukan secara bertahap untuk mencapai status kemandirian, yaitu melalui tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, tahap transformasi kemampuan berupa perluasan wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar untuk bisa berperan dalam pembangunan; dan terakhir tahap peningkatan kemampuan intelektual menuju terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Strategi dan prinsip Pembinaan menurut Rapp, C. A., Saleebey, D. dan Sullivan, W. P. (2005) meliputi; 1) pembinaan sebagai sebuah proses kolaboratif, 2) dalam proses pembinaan menempatkan yang terbina sebagai aktor subjek yang berkompenten, 3) kompetensi subjek pembinaan diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, 4) solusi harus yang berasal dari situasi khusus, 5) jaringan-jaringan informasi sosial sebagai sumber dukungan, 6) masyarakat harus berpartisipasi dalam pembinaan, dan 7) proses pembinaan harus bersifat dinamis, sinergis dan evolutif.

Keberhasilan pembinaan harus dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Schuler, Hasmaeni dan Riley (dalam Mimin Rochayati. 2014) mengembangkan indikator indeks pembinaan (*empowerment Index*), yang mencakup keberhasilan dalam bentuk; 1) keberdayaan dalam ekonomi, 2) kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 3) kemampuan kultural politis. Ketiga indikator tersebut akan dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuatan di dalam (*power with in*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuatan atas (*power over*), dan kekuatan dengan (*power within*).

Ada dua kecenderungan proses pembinaan PKL di suatu kota, yaitu kecenderungan primer dan sekunder (Sedarmayanti. 2009:79). Kecenderungan primer, yaitu menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada pelaku usaha agar menjadi usaha yang lebih berdaya. Sebagian dilakukan dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Sedangkan kecenderungan sekunder menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi agar PKL mampu menentukan apa yang menjadi pilihan usahanya melalui proses dialog.

Masih menurut Sedarmayanti, ada tiga pendekatan dalam membina PKL, yaitu; pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan normatif. Pendekatan budaya menyangkut bentuk pembinaan yang lebih mengedepankan sikap toleransi tinggi dengan istilah '*nguwongke uwong*', sedangkan pendekatan ekonomi menekankan kepada segala upaya yang berhubungan dengan

pengembangan usaha, dan pendekatan normatif menyangkut perihal kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang dibuat pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan rekonstruksi, yaitu menghasilkan produk model pembinaan PKL di Kota Surakarta (Moleong, 2011: 34), yang akan digunakan untuk mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum dan mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, serta menyumbang PAD kota.

Data bahan penyusunan model merupakan data hasil penelitian tahun pertama. Data tahun pertama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari para informan kunci (kalangan PKL), pejabat dan pimpinan organisasi yang memiliki kaitan dengan program pengelolaan PKL di Kota Surakarta. Hasil analisis SWOT selanjutnya dijadikan acuan untuk menghasilkan sebuah produk model pembinaan pada tahun kedua ini.

Proses penelitian tahun kedua ini dilakukan secara 'melingkar' atau berpilin. Dimulai dengan aktivitas merancang model, mengevaluasi dan merevisi model sampai terbentuklah model pembinaan PKL yang tepat (Akker dkk, 2006: 25). Analisis data menggunakan analisis kritis, untuk menganalisis kelebihan dan merevisi kekurangan dari sebuah rancangan model pembinaan itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

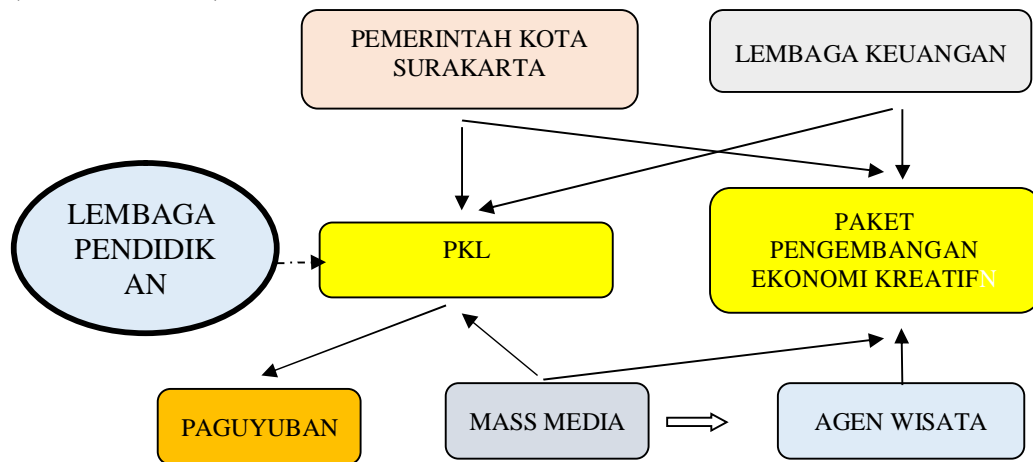
Visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Kota Surakarta seperti tertuang dalam Perda Kota Surakarta nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025. Visi Kota Surakarta dalam 2 dasawarsa, tahun 2005–2025 adalah: "SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA"., sedangkan visi pengembangan ekonomi kreatif adalah "TERWUJUDNYA KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN EKOLOGI".

Misi ekonomi kreatif Kota Surakarta menekankan pada upaya pengembangan bidang produksi, promosi, akses ekonomi kreatif dan partisipasi seluruh *stakeholder*, antara lain, 1) meningkatkan daya saing industri kreatif Kota Surakarta, 2) meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal yang berorientasi pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan, 3) meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, 4) mengembangkan inovasi yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya local, 5) menumbuhkembangkan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Kota Surakarta, dan 6) menguatkan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan kota.

Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Surakarta bertujuan untuk; 1) meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kota Surakarta; 2) peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif yang menggunakan bahan baku lokal dengan orientasi pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan; 3) peningkatan kontribusi ekonomi industri kreatif terhadap PDRB Kota Surakarta; 4) penciptaan inovasi di sektor ekonomi kreatif; 5) pengembangan zona –zona

ekonomi kreatif Kota Surakarta; dan 6) peningkatan citra kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta di mata dunia internasional.

Model Pengembangan program ekonomi kreatif di Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak, antara lain; Pemkot (khususnya dinas yang berhubungan dengan dunia industri dan perdagangan), Lembaga Keuangan, Lembaga Pendidikan Ketrampilan, Mass Media, dan Agen Wisata. Secara skematik pengembangan ekonomi kreatif digambarkan dalam Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif (UNCTAD, 2014):



Gambar 1
Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta

Penilaian Pemkot terhadap keberadaan PKL sangat positif. PKL dinilai sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi kerakyatan kota yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya usaha PKL mendapat perlindungan, pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif agar usaha PKL lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan daerah Kota Surakarta. Visi Pengelolaan PKL Kota Surakarta adalah 'terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta', sedangkan Misi ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat.
2. Mewujudkan PKL yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata.
3. Mewujudkan kawasan dan lokasi PKL yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tujuan penetapan visi dan misi adalah sebagai arah penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL, antara lain adalah ;

1. Mewujudkan PKL yang tertib dan tertata sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan PKL yang tertata dengan dasaran *knock down*.
3. Mewujudkan PKL yang memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
4. Mewujudkan perubahan perilaku PKL yang paham dan peduli lingkungannya.

Bagaimana model pembinaan PKL yang harus dilakukan oleh Pemkot Surakarta? Usaha PKL sebagai usaha perdagangan sedikit banyak memerlukan sentuhan kreativitas tinggi agar dapat memiliki daya tarik sebagai destinasi kuliner dan daya tarik kunjungan wisatawan. Untuk itu pembinaan untuk pemberdayaan merupakan harga mati yang harus sinkron dengan program-program pembangunan kota. Pembinaan atau pemberdayaan harus di atur didalam sebuah Perda tentang Pengelolaan PKL yang di dalamnya disebutkan bahwa; 1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota atau Pemkot berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: a) bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; b) pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; c) bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan d) peningkatan sarana dan prasarana PKL; 2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL; 3) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut ayat (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

Pembinaan PKL harus dibawah koordinasi Dinas Pengelolaan Pasar, cq. Bidang Pengelolaan PKL bersama Dinas Perdagangan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Satpol PP. Secara terintegrasi dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, fasilitasi keperluan pengembangan usaha dan penertiban. Adapun secara lebih rinci, pelaksanaan kegiatan pembinaan mencakup hal-hal sebagai berikut;

1. Bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha PKL, mencakup;
 - a. Bimbingan teknis berdagang melibatkan bagian Pemberdayaan PKL dibantu Dinas Perdagangan;
 - b. Bimbingan teknis akses perolehan sumber-sumber bahan baku melibatkan akademisi perguruan tinggi;
 - c. Bimbingan teknis akses sumber-sumber modal dan pemanfaatan permodalan melibatkan dunia perbankan; dan
 - d. Pendampingan bagi para pedagang menggunakan paguyuban dan akademisi.
2. Penyuluhan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha, meliputi;
 - a. Penyuluhan teknis berdagang yang benar melibatkan Dinas Perdagangan dan praktisi pelaku usaha yang sukses;
 - b. Penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku yang mudah dan murah dengan melibatkan Super Market Luwes Grup; dan
 - c. Penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan yang berdaya guna dan berhasilguna melibatkan Bank Indonesia, Bank Jateng dan Bank Solo.
3. Mendorong pemberdayaan PKL.
 - a. Membantu pendirian koperasi di setiap sentra PKL, antara lain bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk membantu pendirian Koperasi di PKL Komplek Manahan, Pasar Nitiharjo, pasar Alpabes dan sebagainya;
 - b. Membantu peningkatan akses pasar dan pangsa pasar dengan menyelenggarakan acara yang melibatkan PKI, seperti; Car Free Day di sepanjang Jl. Slamet Riyadi dan Pucang sawit setiap hari Minggu jam 05.00

- s.d 09.00. Penyelenggaraan Sunday Market di Komplek Stadion Manahan setiap hari Minggu pagi, Night Market di Ngarsopuro pada saat tertentu.
- c. Membantu peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan dengan bekerjasama dengan Bank Solo dan Bank Jateng.
 - d. Membantu peningkatan akses teknologi tepat guna;
 - e. Membantu peningkatan akses kemitraan dengan Supermarket Luwes Grup berkait dengan pembelian bahan baku oleh PKL, dengan Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian.
 - f. Membantu peningkatan manajemen dan organisasi kelompok (paguyuban);
 - g. Membantu peningkatan manajemen pengelolaan lokasi bekerjasama dengan Dinas pertamanan dan Satpol PP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan Pembinaan

- a. Tahap pertama, penyadaran dan pembentukan karakter berwirausaha yang unggul menuju perilaku sadar dan peduli;
- b. Tahap kedua, transformasi kemampuan berupa perluasan wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar; dan
- c. Tahap ketiga, peningkatan kemampuan intelektual menuju terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

2. Bentuk Pembinaan

- a. Penyuluhan, dan
- b. Pembimbingan

3. Cakupan Pembinaan

- a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- b. Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif; dan
- c. Program pengembangan kewirausahaan.

4. Langkah-langkah Pembinaan

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh PKL.
- b. Penyiapan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh PKL
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi PKL

5. Bidang Pembinaan

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
- b. Bantuan Permodalan
- c. Perlindungan Usaha
- d. Pengembangan Kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Membentuk Lembaga Khusus
- g. Mengembangkan Promosi
- h. Mengembangkan Sarana dan Prasarana

DAFTAR PUSTAKA

- Akker, J. van den, dkk. 2006. *Educational Design Research*. London & New York: Routledge
- Badudu, Yus dan Zain, Sutan Muhammad. 2008. *Kamus Umuum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Minnesota: Wiley.
- Indrianti, Weny. 2014. Perbandingan Kebijakan dan Upaya Pemerintah Dalam Penertiban PKL antara Kabupaten Berau Dengan Tanah Abang Jakarta. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2 (4), 3288-3301.
- Mimin Rochayati. 2014. *Pelaksanaan Pembinaan PKL oleh Dinas Pariwisata Perindagkop dan UMKM di Pasar Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa ILMU.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Qasanova, Elmina Dianti dan Khairani, Tuti. 2013. Evaluasi Penataan dan Pembinaan Pedagang. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2 (1), 1-114.
- Pramono, Muhamad Fajar. Syamsulhadi. Mudiyono. Hariadi, Sunarru Samsi, 2013. Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Di Surakarta, *KANAL*, 1 (2), 111-220.
- Ramadhan, Adam. 2015. Model Zonanisasi Penataan PKL di Kota Bandung. *Unnes Law Journal*, 4 (1).
- Rapp, C. A., Saleebey, D., & Sullivan, W. P. (2005). The future of strengths-based social work. *Advances in Social Work*, 6 (1), 79-90.
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan dari Aspek ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sutrisno, Budi & Suwandi, Joko. 2014. Pola Penataan Pedagang Kaki lima (PKL) di Kota Surakarta: Berdasar Pada Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota. *Laporan Penelitian*. DP2M- Dikti.
- Suwandi, Joko, & Muhibbin, Achmad. 2011. *Penataan PKL Dengan Pendekatan Sambung Rasa Berbasis Budaya Lokal di Kota Surakarta*. Laporan Penelitian LP2M –UMS.
- . 2012. Perubahan Orientasi Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Krisis Moneter di Kota Surakarta : Koreksi Anggapan Bazaar Economy, Order dan Regulation Theory. *Laporan Penelitian Penelitian Fundamental*, DP2M, Dirjen Dikti.
- UNCTAD. 2014. *Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta 2015-2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.